

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Penelitian ini berusaha mengkaji tentang model pendidikan politik yang diberikan oleh Partai Gerindra kepada kader untuk bisa meningkatkan loyalitas kader partai politik sehingga bisa mempertahankan dan meningkatkan keterwakilan kader pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Setiap partai politik pasti memiliki model pendidikan politik tersendiri yang diberikan baik kepada kader atau anggota partai politiknya dan masyarakat. Pendidikan politik yang dimiliki oleh suatu partai politik senantiasa diberikan kepada kader sehingga para kader bisa melaksanakan fungsi utama dari partai politik yaitu untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dan mewujudkan program yang telah disusun berdasarkan ideologi tertentu. Selain itu, pendidikan politik juga diberikan kepada para kader dalam rangka mempersiapkan kader yang kompeten untuk menjadi calon wakil rakyat. Sesuai dengan Kartono (2009) yang mengatakan bahwa pendidikan politik merupakan bentuk pendidikan untuk orang dewasa dengan mempersiapkan kader partai dalam menghadapi pertarungan politik dan demi tercapainya penyelesaian politik agar bisa menang dalam perjuangan politik.

Pengertian pendidikan politik berdasarkan UU No.2 Tahun 2011 Pasal 1, yaitu: “Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan politik juga merupakan salah satu fungsi dari partai politik yang telah tercantum dalam UU No.2 Tahun 2008 Pasal 11: “Partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Pendidikan politik telah dilaksanakan oleh beberapa partai politik di Indonesia sejak Pemilu 2014 hingga Pemilu 2019. Partai Golkar memiliki model pendidikan politik berupa kaderisasi yang memiliki tiga tingkatan, yaitu; pengkaderan umum, pengkaderan khusus, dan pengkaderan territorial kelurahan. Pengkaderan umum dilakukan bagi pengurus partai di tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Sedangkan

fungsional diperuntukan bagi kelompok-kelompok strategis seperti pemuda, pengusaha, dan perempuan. Untuk pengkaderan khusus diberikan kepada kader-kader yang akan atau sedang menduduki suatu jabatan politik. Terakhir, pengkaderan territorial kelurahan dilakukan di tingkat kelurahan sebagai strategi untuk memperluas basis masa. Tetapi, model pendidikan politik pengkaderan seperti itu tidak berjalan dengan baik di Partai Golkar. Hal tersebut dikarenakan internal partai tidak memiliki aturan yang jelas mengenai kewajiban untuk mengikuti pelaksanaan kaderisasi (Syaukani & Fitriyah, 2020)

Partai Nasdem mengusung Akademi Bela Negara (ABN) yang merupakan lembaga pendidikan politik sebagai wadah untuk membekali para kader partai melalui pendidikan karakter, nilai-nilai kebangsaan dan wawasan kepartaian yang berlokasi di Pancoran, Jakarta Selatan (Abn-nasdem.com, 2022). ABN Partai Nasdem dalam memberikan pendidikan politik fokus dalam pembentukan kepribadian, kebangsaan dan keterampilan dalam berpolitik. Kawasan ABN memiliki kapasitas 600 orang. Namun, metode pembelajaran berupa seminar atau workshop bukanlah hal baru dan memang banyak juga diterapkan oleh partai politik lain (Utomo, R, & A, 2023).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki Sekolah Partai sebagai pusat pendidikan dan pelatihan para kader partai yang berlokasi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sekolah Partai mengusung sistem kaderisasi guna melahirkan calon pemimpin yang terstruktur dari bawah (Abdurrahman, 2022). Disana, para kader diterapkan paham Trisakti ajaran Bung Karno, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Bahkan, PDIP pernah mengirim kader terbaiknya ke Cina, Jerman dan Australia untuk belajar mengenai sekolah partai (Kompas.com, 2021). Partai Demokrat mendirikan Akademi Taruna Demokrat yang ditujukan bagi kader muda agar terbentuk kader yang militan dan berjiwa korsa (Demokrat.or.id, 2019). Akademi Taruna Demokrat sengaja dibentuk pada tahun 2019 dan dianggap sebagai akabri-nya Partai Demokrat. Menerapkan sistem tripola dasar, yaitu intelektual, mental dan jasmani, Akademi Taruna Demokrat menerapkan sistem penyisihan dimana pada setiap tahap memungkinkan adanya kader yang tidak lanjut ke babak berikutnya. Namun, Akademi Taruna Demokrat sejauh ini hanya diperuntukan bagi kader muda.

Sebagai partai yang berbasis agama, Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) menerapkan pola kaderisasi kepada kelompok kecil yang berada dibawah bimbingan seorang murabbi (guru) dan pelaksanaanya dilakukan secara non-formal, kegiatan tersebut disebut dengan Tarbiyah (pendidikan) (Djuyandi & Sodikin, 2019). Menyebut dirinya sebagai Partai Dakwah, PKS melakukannya dengan dakwah pendidikan, ekonomi, dan

sosial-kemasyarakatan dalam mewujudkan masyarakat madani yang di ridhai Allah SWT dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada umumnya, kegiatan tarbiyah masih bersifat kolot sehingga kurang pas diterapkan di masa kini. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar pelatihan kaderisasi *Training of Instructor* (TOI) dalam rangka meningkatkan ideologisasi kepartaian Nahdlatul Ulama-PKB, *political skill*, dan manajemen pengelolaan partai. Dalam kegiatan ini para peserta kaderisasi dilatih untuk menjadi instruktur nasional yang handal di pendidikan kader PKB selanjutnya (Freiheit.org, 2017). Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki Sekolah Politik Kerakyatan dalam rangka melahirkan kader dan pasukan khusus PAN. Sekolah Politik Kerakyatan di dalamnya menggelar pendidikan ideologi dan keterampilan serta pembentukan skill politik (Tashandra, 2015).

Partai Gerindra yang baru berdiri pada 6 Februari 2008 masih bisa dibilang sebagai partai baru. Meski begitu, tentunya dengan kegigihan sosok ketua umum Prabowo Subianto, Partai Gerindra terus menunjukkan eksistensinya dan bersaing dengan partai-partai besar. Beberapa struktur Partai Gerindra, yaitu Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pengurus Daerah (DPD), Dewan Pengurus Cabang (DPC), Pengurus Anak Cabang (PAC) dan Ranting (Struktur Organisasi Partai Gerindra, 2022). Pada pemilu pertama yang diikuti tahun 2009, Partai Gerindra berhasil memperoleh 4.642.795 suara dan menempati urutan kedelapan. Kemudian pada pemilu 2014 berhasil meraih 14.750.043 suara dan naik di urutan ketiga. Pada pemilu 2019, seakan terus meningkatkan eksistensinya, Partai Gerindra memperoleh 17.594.839 suara meskipun tetap berada di urutan ketiga (Badan Pusat Statistik, 2020). Apabila dilihat dari pemilu legislatif 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel, Partai Gerindra berhasil mendapatkan 79.844 suara dan berada pada urutan ketiga setelah Partai Golkar (121.868 suara) dan PDIP (113.298 suara) (Kabartangsel.com, 2014). Dengan jumlah tersebut, Partai Gerindra mendapatkan 7 kursi di DPRD Tangerang Selatan. Di pemilu legislatif tahun 2019, Partai Gerindra berhasil memperoleh total 101.289 suara sah berdasarkan data yang tercantum di Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Tangsel. Jumlah tersebut membuat Partai Gerindra berada di urutan ketiga terbesar setelah Partai Golkar yang memperoleh 124.467 dan PDIP yang memperoleh 113.768 suara (RPP KPU Kota Tangerang Selatan, 2019). Dengan jumlah tersebut Partai Gerindra berhasil memperoleh 8 kursi di DPRD Kota Tangsel.

Meskipun hanya berhasil menambah satu kursi di DPRD Kota Tangsel, tetapi Partai Gerindra menunjukkan konsistensinya dengan tetap berada di urutan ketiga.

Keberhasilan Partai Gerindra dalam memperoleh suara masyarakat di Kota Tangsel dan menduduki urutan ketiga terbesar merupakan sebuah pencapaian yang baik sekaligus dijadikan potensi untuk bisa meningkatkan elektabilitasnya pada Pemilu 2024. Melihat peningkatan elektabilitas Partai Gerindra yang terjadi dari dua pemilu sebelumnya menjadi faktor alasan peneliti menjadikan Partai Gerindra DPC Kota Tangsel sebagai objek penelitian untuk mengetahui bagaimana dampak dari pendidikan politik yang dilakukan kepada kader partai dalam meningkatkan dan mempertahankan keterwakilan kader di DPRD Kota Tangsel pada pemilu 2019. Terkhusus Kota Tangsel juga merupakan kota baru yang terbentuk pada tahun akhir tahun 2008 akibat pemekaran dari Kabupaten Tangerang ([biropemotda.bantenprov.g.id](http://biropemotda.bantenprov.g.id)). Sehingga Kota Tangsel membutuhkan berbagai kemajuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Pendidikan politik yang telah dilaksanakan oleh Partai Gerindra berupa kaderisasi yang berisi pelatihan kepada kader partai untuk menanamkan wawasan kebangsaan dan bersifat wajib bagi kader partai mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi (Maulana, 2020).

Berdasarkan konteks diatas sangat penting untuk menganalisis lebih lanjut tentang pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra DPC Kota Tangsel kepada para kadernya. Pendidikan politik adalah bagian fundamental dari sebuah partai untuk menunjukkan kekuatan partai khususnya bagi para kader agar mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan politik, khususnya mencapai kemenangan dalam pemilu (Rohmah, Hermawan, & Indriyani, 2020). Peningkatan suara yang diperoleh dari pemilu tahun 2014 dan 2019 juga merupakan hasil dari pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Gerindra sehingga melahirkan para kader dengan tingkat loyalitas yang tinggi untuk mendukung pemenangan pemilu legislatif, khususnya di Kota Tangsel. Selain itu, Pada penelitian ini, peneliti berusaha mengkaji menggunakan kerangka konsep pemilihan umum dan partai politik. Sedangkan untuk pendekatan teori peneliti menggunakan teori pendidikan politik.

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh pendidikan politik dalam meningkatkan dan mempertahankan keterwakilan kader partai politik telah banyak dipublikasikan. Untuk mendukung kebaruan dari penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa penelitian yang memiliki relevansi yang mendukung dan sesuai dengan penelitian ini. Penelitian ini akan membandingkan hal-hal penting seperti tempat penelitian, waktu, dan aspek keilmuan yang saling berhubungan dan menguatkan.

Pertama, peneliti memilih penelitian yang berjudul “**Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat**” oleh Masriyani dan Herma Yanti (2019). Penelitian Masriyani dan Herma Yanti (2019) membahas tentang peran partai politik di Indonesia. Lebih fokus, penelitian ini memaparkan peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat luas beserta regulasi yang mengaturnya. Tujuannya adalah agar masyarakat menyadari hak dan perannya di negeri demokrasi ini dan bisa menjadi pemilih yang cerdas dalam pemilihan umum. Sehingga masyarakat bisa memilih para wakil yang benar-benar cakap dalam menjalankan tugasnya kelak. Melaksanakan pendidikan politik juga merupakan amanat Undang-Undang yang perlu dilaksanakan seperti yang tertera dalam pasal 11 ayat 1 UU No 2 tahun 2008 tentang partai politik sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan masyarakat.

Relevansi penelitian Masriyani dan Yanti (2019) dengan penelitian ini adalah membahas mengenai pentingnya bagi sebuah partai politik untuk memberikan pendidikan politik. Sebagaimana tugas partai politik yang tercantum pada pasal 11 ayat 1 UU No 2 tahun 2008. Dari penelitian Masriyani dan Yanti (2019), peneliti menemukan bahwa partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota berhak mendapatkan bantuan yang diberikan secara proporsional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun, konsekuensi yuridisnya adalah partai politik wajib memberikan laporan pertanggungjawaban atas bantuan keuangan yang telah diberikan kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Masriyani, 2019). Perbedaan antara penelitian Masriyani dan Yanti (2019) dengan penelitian ini adalah sasaran dalam pemberian politik dimana Masriyani dan Yanti fokus dalam pemberian pendidikan politik kepada masyarakat luas sedangkan penelitian ini fokus dalam pemberian pendidikan politik bagi kader internal partai. Maka dari itu, setelah membaca penelitian oleh Masriyani dan Yanti (2019), peneliti terinspirasi untuk melakukan penelitian kepada model pendidikan yang diberikan bagi kader sebuah partai.

Kedua, peneliti memilih penelitian yang berjudul “**Peranan Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Yang Berkarakter Terhadap Masyarakat**” yang ditulis oleh Dra. Elisabeth Sitepu, M.Si. (2016) membahas mengenai peran partai politik sebagai tiang demokrasi di Indonesia, yaitu sebagai sarana untuk menyediakan dan

menyalurkan pendidikan politik. Pendidikan politik dapat kita artikan sebagai bentuk usaha yang sadar dan sistematis dalam mengubah segala hal yang berkaitan dengan perjuangan partai politik kepada masyarakat dengan tujuan untuk menyadarkan mereka akan peran, fungsi, hak, dan kewajibannya sebagai seorang warga negara (Sitepu, 2016). Kenyataan di lapangan menunjukkan buruknya citra partai politik di hadapan masyarakat Indonesia sehingga membuat rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Hal tersebut kemudian menuntun kepada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Maka dari itu, penelitian ini menyatakan bahwa pembangunan karakter (*character building*) adalah hal utama yang harus dilakukan oleh partai politik dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Tujuannya adalah demi membangun setiap individu untuk memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia sehingga menciptakan *good society*.

Relevansi penelitian Sitepu (2016) dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas citra partai politik yang buruk di hadapan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan oleh ketidaksesuaian kinerja kader partai politik, seperti melakukan politik uang atau *money politics*. Situasi tersebut kemudian menuntun kepada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Kelebihan dari penelitian Sitepu (2016) adalah hampir di setiap pembahasannya terdapat undang-undang sebagai referensi sehingga pembaca juga akan mengetahui bahwa segala hal tentang partai politik hingga pendidikan politik sudah memiliki regulasinya tersendiri. Kekurangannya adalah, penelitian masih membahas bentuk pendidikan politik secara umum dan tidak difokuskan kepada bentuk pendidikan politik nyata yang diberikan oleh partai politik di Indonesia. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk membahas model pendidikan politik seperti apa yang diberikan oleh sebuah partai kepada kader nya, yaitu Partai Gerindra untuk meningkatkan dan mempertahankan keterwakilan kader di DPRD Kota Tangsel khususnya dalam pemilu 2019.

Ketiga, peneliti memilih penelitian dengan judul “**PENDIDIKAN PARTAI POLITIK (Studi Tentang Pendidikan Politik DPC Partai Gerindra Kota Tangerang Selatan 2014-2019)**” karya Achmad Shidqi Maulana (2020). Penelitian Maulana (2020) dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai bentuk pendidikan politik yang diterapkan oleh Partai Gerindra secara umum, kemudian difokuskan lagi kepada Dewan Pengurus Cabang Kota Tangerang Selatan selama periode 2014-2019. Pertama-tama, penelitian Maulana (2020) memaparkan bahwa sasaran pendidikan politik Partai Gerindra ada dua, yaitu untuk kader dan masyarakat luas. Tujuan pendidikan politik kepada kader

adalah sebagai bekal ketika mereka mencalonkan diri sebagai wakil rakyat agar bisa menjadi wakil rakyat yang cakap dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan, tujuan pendidikan politik Partai Gerindra yang ditujukan untuk masyarakat luas adalah agar masyarakat bisa menjadi subjek politik dan bukan hanya menjadi objek politik elektoral yang hanya digunakan ketika momen kampanye politik menjelang pemilu (Maulana, 2020).

Kesuksesan Partai Gerindra dalam melaksanakan pendidikan politik khususnya di DPC Kota Tangerang Selatan menjelang pemilu 2014 terbukti dengan berhasil meraih 7 kursi di DPRD Tangsel. Hal tersebut tidak membuat Partai Gerindra puas dan berhenti sampai disitu saja, Partai Gerindra melanjutkan pendidikan politiknya secara terus menerus hingga pada pemilu 2019 berhasil meraih 8 kursi di DPRD Tangsel. Keberhasilan tersebut tentu berasal dari bentuk pendidikan politik yang diberikan oleh Partai Gerindra kepada kader dan masyarakat luas. Dalam pendidikan politiknya, Partai Gerindra berfokus untuk menanamkan wawasan kebangsaan sebagai hal dasar yang harus dimiliki oleh warga Indonesia agar bisa menjadi warga negara yang paham akan hak dan fungsinya. Perbedaan penelitian Maulana (2020) dengan penelitian ini adalah isinya membahas pendidikan politik oleh Partai Gerindra DPC Kota Tangsel dalam periode 2014-2019 sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai model pendidikan politik yang diberikan kepada kader Partai Gerindra DPC Tangsel dan apa dampaknya bagi para kader dan Partai Gerindra DPC Tangsel. Maka dari itu, penelitian ini merupakan pelengkap dari penelitian oleh Achmad Shidqi Maulana.

Keempat, peneliti memilih penelitian yang berjudul **“Peranan Pendidikan Politik Terhadap Pembentukan Kader Parpol Pada Partai Gerindra di Kabupaten Cianjur”** karya Siti Rohmah, Iyep Candra Hermawan dan Dina Indriyani (2019). Penelitian Rohmah, Hermawan dan Indriyani (2019) membahas pentingnya pendidikan politik dilakukan oleh suatu partai untuk membentuk keterbukaan dan keluwesan berpikir terhadap partai politik. Pembentukan *image* politik yang baik juga dapat dipancarkan oleh sebuah partai politik apabila partai tersebut berhasil dalam mengenali setiap potensi yang ada di lingkungan masyarakat dan bersifat mengikat dengan cara menyematkan pemahaman tentang partai kedalam benak masyarakat. Sehingga partai politik dapat dengan mudah mendapatkan pandangan atau citra yang baik untuk kemudian mempermudah masyarakat dalam mengidentifikasi suatu partai politik.

Relevansi penelitian Rohmah, Hermawan dan Indriyani (2020) dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai pentingnya pendidikan politik yang perlu diberikan oleh partai politik kepada masyarakat luas sebagaimana tugas partai politik yang tercantum pada pasal 11 ayat 1 UU No 2 tahun 2008 dan berfokus di partai yang sama, yaitu Partai Gerindra. Perbedaannya adalah penelitian Rohmah, Hermawan dan Indriyani (2020) berfokus kepada peran pendidikan politik terhadap pembentukan karakter Partai Gerindra di Kabupaten Cianjur, sedangkan penelitian ini berfokus kepada pendidikan politik yang dilakukan DPC Partai Gerindra Kota Tangsel. Setelah membaca penelitian karya Rohmah, Hermawan dan Indriyani (2020), peneliti memilih untuk melakukan penelitian mengenai model pendidikan politik seperti apa yang dilakukan di Partai Gerindra DPC Kota Tangsel sehingga mengetahui apakah bentuk pendidikan yang dilakukan sama atau berbeda.

Kelima, peneliti memilih penelitian dengan judul **“Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa”** karya Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amrullohi. Penelitian Pahlevi dan Amrullohi membahas mengenai maraknya kegiatan politik uang atau korupsi dilakukan ketika kampanye politik. Kegiatan politik uang kemudian akan menuntun pada mahalanya biaya untuk melakukan kampanye. Seorang kandidat yang melakukan kampanye dengan menerapkan politik uang hanya akan mementingkan kepentingan sendiri tanpa mementingkan peranya untuk bisa mengabdikan kepada masyarakat. Sehingga apabila terpilih, hal utama yang menjadi prioritas kandidat tersebut adalah memikirkan bagaimana caranya untuk bisa mengembalikan modal besar yang digunakan dalam pemilu bukan memikirkan rakyat. Dalam rangka menanggulangi kegiatan politik uang, Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan upaya pendidikan politik dengan mendeklarasikan Desa Anti-Politik-Uang (APU) dengan mengajak semua *stakeholder* yang berkaitan dengan demokrasi seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Yogyakarta, LSM, Perguruan tinggi, tokoh masyarakat dan aktor masyarakat setempat. Gerakan pendidikan politik Desa Anti-Politik-Uang dilakukan dengan menerapkan upaya *pre-emptif* kepada masyarakat desa setempat dalam rangka menanamkan pemahaman politik di benak masyarakat.

Relevansi penelitian Pahlevi dan Amrullohi dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas bagaimana model pendidikan politik yang penting untuk dilakukan sebagai strategi untuk mengedukasi masyarakat dalam menghadapi pemilu. Perbedaannya adalah pendidikan politik yang dilakukan dalam peneliti Pahlevi dan Amrullohi



dipelopori oleh Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dan bentuknya lebih mengarah kepada suatu gerakan sosial. Maka dari itu, setelah membaca penelitian Pahlevi dan Amrurrobi, peneliti memiliki ide untuk membuat penelitian mengenai bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh sebuah partai, khususnya Partai Gerindra sebagai bentuk meningkatkan dan mempertahankan keterwakilan kader di DPRD Kota Tangerang Selatan.

Keenam, peneliti memilih penelitian yang berjudul **“Indonesia Political Development: Democracy, Political Parties in the Political Education Perspective”** karya Budi Kurniadi (2019). Penelitian Kurniadi (2019) membahas mengenai perkembangan politik yang memiliki keterkaitan dengan adanya perubahan sosial dan politik yang bersifat progresif. Sebagai negara demokrasi, Indonesia mengimplementasikan kelembagaan politik untuk bisa mencapai pemerintahan yang demokratis. Salah satunya dengan adanya partai politik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Partai politik merupakan wadah bagi masyarakat dalam sebuah negara demokrasi untuk bisa berpartisipasi dalam setiap proses penyelenggaraan negara dan sebagai sarana bagi elit politik untuk dapat mencapai penguasaan politik. Namun, eksistensi partai politik di Indonesia biasanya memiliki masalah masing-masing. Salah satu contohnya, kegiatan kepartaian masih bersifat musiman atau hanya dilakukan menjelang Pemilu atau Pilkada saja. Padahal masih banyak fungsi partai politik yang harus dilaksanakan, seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pendidikan politik, pengendalian konflik, partisipasi politik, dan kontrol politik. Beberapa fungsi tersebut perlu dilakukan dalam kegiatan kepartaian dan tidak dilakukan musiman. Untuk menyempurnakan pelaksanaan fungsi partai politik perlu dilakukan pendidikan politik kepada masyarakat dengan tujuan untuk membangun masyarakat yang lebih demokratis dan menanamkan wawasan kebangsaan kepada masyarakat sehingga bisa mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara dan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

Relevansi penelitian Kurniadi (2019) dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pentingnya pendidikan politik dilaksanakan oleh partai politik kepada masyarakat. Hal ini tentunya agar masyarakat bisa memiliki jiwa berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Perbedaannya adalah, penelitian Kurniadi (2019) membahas pendidikan politik sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh partai politik. Sedangkan penelitian ini membahas pentingnya pendidikan politik sebagai strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan

kursi di DPRD Kota Tangerang Selatan dalam pemilu 2019. Kekurangan dari penelitian Kurniadi (2019) adalah di bagian pembahasan belum disebutkan bentuk pendidikan politik yang harus diberikan kepada masyarakat seperti apa dan belum difokuskan kepada partai tertentu. Maka dari itu, setelah membaca penelitian Kurniadi (2019) peneliti tertarik untuk memfokuskan pembahasan mengenai pentingnya model pendidikan politik dilakukan oleh Partai Gerindra DPC Kota Tangerang Selatan dalam mempertahankan dan meningkatkan kursi di DPRD Kota Tangerang Selatan di pemilu 2019.

Ketujuh, peneliti memilih penelitian yang berjudul **“A Political Education Model of Political Parties in Indonesia”** karya Vina Salviana Darvina Soedarwo (2019). Penelitian Soedarwo (2019) membahas mengenai bentuk pendidikan yang dilakukan oleh empat partai besar di Indonesia, yaitu PDIP dan Partai Golkar mewakili era pra-reformasi sedangkan Partai Gerindra dan PKS mewakili era pasca reformasi. Penelitian Soedarwo (2019) berupaya untuk memaparkan bentuk pendidikan politik seperti apa yang berusaha diterapkan oleh empat partai politik tersebut kepada masyarakat dan untuk mengetahui adakah bentuk pendidikan politik yang berbasis kepekaan gender. Menurut Soedarwo (2019), adanya pendidikan politik berbasis gender penting untuk diterapkan kepada masyarakat dalam pendidikan politik oleh partai politik. Hal ini bertujuan agar melalui partai politik, Indonesia dapat lebih memperhatikan perempuan dan masalah kesetaraan gender dapat terselesaikan.

Relevansi penelitian Soedarwo (2019) dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia. Perbedaannya adalah penelitian Soedarwo (2019) cenderung fokus dalam menemukan bentuk pendidikan politik yang berfokus kepada pendidikan politik berbasis gender. Kelebihan penelitian Soedarwo (2019) adalah berhasil dalam memaparkan visi dan misi empat partai yang relatif besar di Indonesia secara singkat dan jelas. Kekurangannya adalah belum menyebutkan dengan jelas bentuk pendidikan politik seperti apa yang dilakukan oleh keempat partai politik tersebut. Maka dari itu, peneliti memfokuskan penelitian ini kepada bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh salah satu partai politik di Indonesia, yaitu Partai Gerindra untuk meningkatkan dan mempertahankan keterwakilan kader di DPRD Kota Tangsel.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah **bagaimana model pendidikan politik Partai Gerindra DPC Kota Tangsel memberikan dampak dalam mempertahankan dan meningkatkan keterwakilan partai di DPRD Kota Tangsel pada pemilu 2019?**

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model pendidikan politik Partai Gerindra DPC Kota Tangsel memberikan dampak dalam mempertahankan dan meningkatkan keterwakilan partai di DPRD Kota Tangsel pada pemilu 2019.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **a. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur baru mengenai pendidikan politik oleh partai politik, terkhusus Partai Gerindra DPC Kota Tangsel dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan keterwakilan partai di DPRD Kota Tangsel pada Pemilu 2019.

### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi para pelaku politik sehingga dapat mengoptimalkan peran partai politik dalam mewujudkan pendidikan politik sebagai instrumen yang sangat penting bagi sebuah partai.

## **I.5 Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan yang peneliti gunakan dalam penyusunan laporan penelitian ini adalah:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup latar belakang mengenai model pendidikan politik yang diberikan oleh Partai Gerindra kepada kader partai dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan keterwakilan partai di DPRD Kota

Tangsel pada Pemilu 2019, penelitian terdahulu, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mencakup kerangka konsep pendidikan politik, kerangka teori yang digunakan sebagai ikhtisar fakta dalam sebuah penelitian dan kerangka berpikir.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini mencakup jenis penelitian, cakupan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini mencakup hasil dari penelitian yang sudah dilakukan berdasarkan pada latar belakang masalah dan menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan di pendahuluan.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini mencakup kesimpulan dari hasil penelitian beserta jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan dan memberikan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bagian ini mencakup daftar sumber atau referensi yang digunakan oleh penulis selama proses menyusun penelitian.